

**KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI



Nama : Widia Juli Artika

Nim : 222018190

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Widia Juli Artika

Nim : 222018190

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

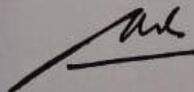
Fakultas ekonomi dan bisnis
Universitas muhammadiyah Palembang
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Dan Provinsi Lampung.
Nama : Widia Juli Artika
Nim : 22 2018 190
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

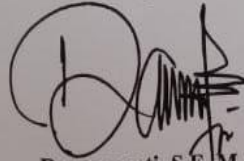
Diterimah Dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2022

Pembimbing I



Dr. Drs Sunardi, S.E., M.Si.,
NIDN. 0206046303

Pembimbing II



Darmavanti, S.E., M.M
NIDN. 0219057901

Mengetahui
Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Drs Sunardi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0216106902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widia Juli Artika

Nim : 22 2018 190

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dan Lampung.

Dengan ini menyatakan :

1. sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendirian tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima.

Palembang, Februari 2022

Saya Menyatakan


Widia Juli Artika

222018190



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata 1 (guna) meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan terutama orang tua Ayahanda saya bapak Danial dan Ibunda saya Sasmita serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Drs Sunardi, S.E., M.,Si., dan ibu Darmayanti, S.E., M,M yang telah membimbing dan memberi masukan guna menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,AK.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor badan pemeriksaan keuangan republik Indonesia (BPK RI) Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta, bapak dan ibuku ialah bapak Danial dan Ibu Sasmita, adik pertamaku Rama Doni dan adik keduaku Saira yang selalu mensupport saya selama ini.
8. Keluarga besar bapak Gusali dan bapak Ismail yang telah ikut mendo'akan, mendukung, mensupport serta selalu memberi arahan dan semangat sehingga saya sampai dititik terakhir ini.
9. Sahabat-sahabatku yang telah kebersamai dan memberikan motivasi dalam segala hal sejak awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah bekerjasama menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2022

Widia Juli Artika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah.”

(HR. Muslim)

“Sebaiknya-baiknya pertolongan, pertolongan dari Allah lah yang menyelamatkan”.

“Tetaplah berjuang dan berusaha selagi itu masih ada kesempatan, meskipun ada badai dan rintangan sebesar apapun, percayalah karena hal yang telah di takdirkan untuk kita pasti menjadi milik kita.”

(Widia Juli Artika dnl)_

Ku Persembahkan Skripsi ini kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Danial dan Ibu Sasmita**
- ❖ Adik-Adikku Tercinta Ramadoni dan Saira**
- ❖ Keluarga Besar Bapak Ismail dan Bapak Gusali**
- ❖ Dosen Pembimbingku Bapak Dr. Drs Sunardi, S.E., M.Si., dan Ibu Darmayanti, S.E., M.M.**
- ❖ Almamaterku**

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
HALAMAN ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS	
A. Kajian Pustaka	14
B. Penelitian Sebelumnya	27
C. Kerangka Pemikiran	31
D. Hipotesis	35
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Operasionalisasi Variabel.....	36
D. Populasi Dan Sampel.....	37
E. Data Yang Diperlukan	39

F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58
C. Pembahasan.....	62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Laporan Data Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.....	5
Tabel II.1 Penelitian sebelumnya.....	29
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	36
Tabel III.2 Prosedur Penarikan Sampel	37
Tabel IV.1 Gambaran Hasil Penelitian	56
Tabel IV.2 Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif.....	59
Tabel IV.3 Uji Multikolinieritas	61
Tabel IV.4 Uji Autokorelasi.....	61
Tabel IV.5 Uji F (Simultan)	63
Tabel IV.6 Uji t (Parsial).....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	34
Gambar IV.1 Uji Normalitas.....	60
Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas.....	62

ABSTRAK

Widia Juli Artika/222018190, karakteristik pemerintah daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung (Di bawah bimbingan dosen pembimbing 1 bapak Dr. Drs. Sunardi, S.E,M.Si dan Pembimbing II ibu Darmayanti, S.E., M,M).

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan menggunakan aplikasi statistik SPSS Versi 25.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel status daerah, tingkat kemakmuran dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung. Dan terdapat variabel belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung.

Kata Kunci : status daerah, tingkat kemakmuran, belanja modal, tingkat ketergantungan,dan kinerja pemerintah daerah.

ABSTRACT

Widia Juli Artika/222018190, “karakteristik pemerintah daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi lampung”.

This study basically aims to determine the characteristics of local governments on the financial performance of local governments in the district/cities of south Sumatra and lampung provinces. In writing this thesis the author uses secondary data collection techniques. This study uses multiple linear regression analysis techniques and uses the statistical application of SPSS version 25.

The results showed that partially the regional status variable, the level of prosperity and the level of dependence has no effect and is not significant on financial performance local government in the regency/city of the province of south sumatera and lampung province. And there is a capital expenditure variable that has a significant effect on the government's financial performance region in the regencies/cities of the province of south Sumatra and the province of lampung.

Keywords: regional status, prosperity level, capital expenditure, dependency level, and local government financial performance.

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
	WIDIA JULI ARTIKA	222018190	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio efektivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004:159). Jadi analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Terselenggaranya *good governance* merupakan salah satu persyaratan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Pemberian dana perimbangan oleh pusat kepada daerah adalah resiko dari penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, pemerintah pusat secara rutin mentransfer dana bantuan pada daerah yang nantinya akan digunakan secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat atau untuk kepentingan lainnya (Darwanto dan Yustikasari, 2010).

Status daerah merupakan sebuah pengakuan nasional atas suatu daerah sebagai kabupaten atau kota yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Pemerintah kota dengan sumber dana yang lebih baik akan mempunyai kemungkinan yang lebih baik pula dalam pelaksanaan pemerintah daerah karena dukungan sumber daya tersebut untuk mencapai sasaran pemerintah daerah, sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik. Status daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Status daerah provinsi kabupaten/kota selain berstatus daerah juga merupakan wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota (Ni Made, 2016).

Tingkat kemakmuran pemerintah daerah dapat diketahui dari total pendapatan asli daerahnya, semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin makmur pula suatu daerah (Abdullah, 2004). Kemakmuran dapat diukur dengan perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan total pendapatan (Sudarsana, 2013).

Belanja modal merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun yang memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintahan daerah diharapkan akan mengacu pertumbuhan perekonomian daerah apabila sarana

dan prasarana memadai maka akan melakukan aktifitas sehari-sehari dengan aman dan nyaman yang akan berpengaruh terhadap produktifitasnya (Asnidar, Novia Sintia Hardi, 2019).

Tingkat ketergantungan menjadi salah satu indikator lain yang dapat mempengaruhi, dilihat dari dana alokasi umum (DAU) yang merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat semakin besar dana alokasi umum (DAU) yang diberikan maka akan semakin tinggi pula tingkat pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan alokasi. Dengan pemantauan yang tinggi oleh pemerintah pusat maka memotivasi pemerintah daerah untuk memberikan kinerja keuangan yang baik (Sumarjo, 2010).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaiannya pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013:25).

Ni made (2016) karakteristik pemerintah daerah ialah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintahan daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. sedangkan menurut Suhadjanto dan yulianingtyas (2015) karakteristik pemerintah daerah yaitu ciri khusus pada pemerintahan daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain.

Ni made (2016) status daerah merupakan sebuah pengakuan nasional atas suatu daerah sebagai kabupaten atau kota. Pemerintah kota dengan sumber

dana yang lebih baik akan mempunyai kemungkinan yang lebih baik pula dalam pelaksanaan pemerintah daerah karena dukungan sumber daya tersebut untuk mencapai sasaran pemerintah daerah, sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan salah satu dari dua subsistem dalam system pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, SKPD diberikan kuasa untuk menggunakan alokasi dana (Anggaran) dan barang atau aset yang dibutuhkan.

Lia (2017) Tingkat kemakmuran (*wealth*) adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan kemakmuran daerah dari pemerintahan daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hasil kekayaan riil dari masing-masing pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, Distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Hidayat (2017 :82) Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian / pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujudnya nilai manfaatnya lebih dari satu tahun atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintahan daerah. Kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Melakukan analisis rasio keuangan pada APBD berarti membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode

dengan periode sebelumnya sehingga kecenderungan yang terjadi dapat diketahui penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya kita harus melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, seperti yang dicantumkan dalam PP No. 6 tahun 2008 kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan banyaknya dana perimbangan yang diserahkan oleh pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi, dana yang berpokok dari apbn tersebut diberikan kepada daerah guna membiayai kegiatan daerahnya dana itu tersebut dana perimbangan.

Yoyo (2017 : 9) kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasalalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa karakteristik status daerah tidak berpengaruh terhadap tindakan melanggar hukum dan kecurangan. Suhadjanto dan Yulianingtyas (2010) karakteristik status daerah berpengaruh karna yaitu ciri khusus pada pemerintahan daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain.

Penelitian sebelumnya Dy Ilham (2018) menyatakan tingkat kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian sebelumnya dilakukan Nugroho Dan Budiantara (2016), menyatakan tingkat kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mulia (2016) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nugroho (2012) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ara Dkk (2016) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nordhiawan dan Hertianti (2010) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berikut ini disajikan mengenai laporan realisasi anggaran APBD dan neraca Se kabupaten/kota provinsi sumatera selatan dan provinsi lampung tahun 2018 dan 2019.

Tabel I.1
Ringkasan Laporan Realisasi APBD Se Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung Tahun 2018
Dan 2019.

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Status Daerah	PAD	Belanja Modal
1.	Kota Palembang	2018	1	3.528.010.712.283	1.537.275.105.768,15
		2019	1	3.494.510.853.251	1.606.219.507.432,26
2.	Kab. Banyuasin	2018	0	140,600.000.000.00	1.992.040.000.000.00
		2019	0	200,620.000.000,00	424,910.000.000.000

3.	Kab. Empat Lawang	2018	0	32.217.492.488,71	248.436.146.175,13
		2019	0	41.672.141.481,16	253.146.607.390,00
4.	Kab. Lahat	2018	0	112.571.296.475,37	309.562.329.259,38
		2019	0	141.161.144.249,35	396.808.861.445,88
5.	Kab. Muara Enim	2018	0	135.400.000.000,00	2.434.300.000.000
		2019	0	303.300.000.000,00	888.470.000.000,00
6.	Kab. Musi Banyuasin	2018	0	210.238.037.283,96	871.952.810.972,96
		2019	0	286.694.847.515,54	1.102.419.234.360,91
7.	Kab. Musi Rawas	2018	0	106.290.000.000,00	2.959.060.000.000,00
		2019	0	37.570.000.000,00	430.930.000.000,00
8.	Kab. Musi Rawas Utara	2018	0	20.141.830.709,51	223.942.365.967,70
		2019	0	37.574.950.336,98	294.412.850.373,03
9.	Kab. Ogan Ilir	2018	0	55.362.963.113,45	275.666.163.928,36
		2019	0	88.150.588.157,79	323.235.226.236,00
10.	Kab. Ogan Komering Ilir	2018	0	239.946.143.259,17	302.186.496.005,00
		2019	0	195.401.652.977,59	626.423.290.261,00
11.	Kab. Ogan Komering Ulu	2018	0	156.620.000.000,00	1.419.170.000.000,00
		2019	0	145.560.000.000,00	348.990.000.000,00
12.	Kab. Oku Selatan	2018	0	42.990.000.000,00	1.228.200.000.000,00
		2019	0	57.670.000.000,00	381.550.000.000,00
13.	Kab. Oku Timur	2018	0	85.235.167.420,53	278.116.679.110,08
		2019	0	99.017.727.658,01	508.497.584.654,80
14.	Kab. Pali	2018	0	74.392.980.925,88	622.813.258.525,60
		2019	0	84.794.229.883,15	764.119.060.809,70
15.	Kota. Lubuk Linggau	2018	1	106.606.816.786,70	209.920.267.732,24
		2019	1	100.950.266.993,96	264.283.982.721,00
16.	Kota Pagaralam	2018	1	73.600.000.000,00	655.600.000.000,00
		2019	1	60.060.000.000,00	216.250.000.000,00
17.	Kota Prabumulih	2018	1	90.910.521.066,19	119.551.241.841,43
		2019	1	100.975.564.957,57	311.715.302.708,00
18.	Kab. Lampung Barat	2018	0	100.980.000.000,00	1.109.750.000.000,00
		2019	0	65.270.000.000,00	220.880.000.000,00
19.	Kab. Tanggamus	2018	0	61.714.421.073,28	172.288.682.875,00
		2019	0	76.050.778.580,12	241.692.701.030,00
20.	Kab. Lampung Selatan	2018	0	215.411.464.185,87	383.352.881.955,00
		2019	0	275.464.317.224,17	374.849.892.710,47
21.	Kab. Lampung Timur	2018	0	125.040.000.000,00	2.002.790.000.000,00
		2019	0	147.530.000.000,00	204.550.000.000,00
22.	Kab. Lampung Tengah	2018	0	102.290.000.000,00	2.388.870.000.000,00
		2019	0	193.630.000.000,00	347.460.000.000,00
23.	Kab. Lampung Utara	2018	0	102.290.000.000,00	1.677.660.000.000,00

		2019	0	102.590.000.000.00	120.760.000.000.00
24.	Kab. Way Kanan	2018	0	56.760.000.000.00	1.501.100.000.000.00
		2019	0	62.350.000.000.00	297.970.000.000.00
25.	Kab. Tulang Bawang	2018	0	67.800.000.000.00	1.182.410.000.000.00
		2019	0	82.380.000.000.00	137.580.000.000.00
26.	Kab. Pesawaran	2018	0	58.270.000.000.00	1.340.310.000.000.00
		2019	0	65.690.000.000.00	196.560.000.000.00
27.	Kab. Pringsewu	2018	0	71.820.000.000.00	1.159.680.000.000.00
		2019	0	86.310.000.000.00	188.980.000.000.00
28.	Kab. Mesuji	2018	0	33.210.000.000.00	812.660.000.000.00
		2019	0	45.620.000.000.00	215.960.000.000.00
29.	Kab. Tulang Bawang Barat	2018	0	27.610.000.000.00	966.960.000.000.00
		2019	0	32.410.000.000.00	269.910.000.000.00
30.	Kab. Pesisir Barat	2018	0	23.480.000.000.00	797.060.000.000.00
		2019	0	29.320.000.000.00	177.050.000.000.00
31.	Kota. Bandar Lampung	2018	1	550.280.000.000.00	2.190.210.000.000.00
		2019	1	627.300.000.000.00	310.730.000.000.00
32.	Kota Metro	2018	1	132.200.000.000.00	870.140.000.000.00
		2019	1	176.200.000.000.00	209.520.000.000.00

(sumber : *BPK RI, 2018 - 2019*)

Dilihat dari data status daerah maka dapat disimpulkan bahwa nilai kota lebih besar dari pada kabupaten. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerahnya lebih besar dari pada pendapatan kabupaten, fasilitasnya lebih lengkap, lingkup pemerintahannya lebih luas, Karna itulah lingkup kota lebih besar dari pada lingkup kabupaten. Berikut disajikan mengenai laporan realisasi anggaran APBD dan neraca Se kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel I.2

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Sekabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung Tahun 2018 Dan 2019.

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Total Pendapatan	DAU	Skor EKPPD
1.	Kota Palembang	2018	3.485,880.000.000	1.269,430.000.000	3.0768
		2019	3.987,550.000.000	1.357,510.000.000	3.0768
2.	Kab. Banyuasin	2018	2.080,650.000.000	933,630.000.000	2.9786

		2019	2.449,780.000.000	979,540.000.000	2.8552
3.	Kab. Empat Lawang	2018	978,620.000.000	424,810.000.000	2.8922
		2019	1.057,870.000.000	445,130.000.000	2.8922
4.	Kab. Lahat	2018	1.91,870.000.000	694,390.958.000	3.0574
		2019	2.276,670.000.000	740,460.000.000	2.8902
5.	Kab. Muara Enim	2018	2.525,580.000.000	661,340.000.000	3.1195
		2019	3.072,030.000.000	703,070.000.000	2.9910
6.	Kab. Musi Banyuasin	2018	3.019,700.000.000	370,830.000.000	3.0575
		2019	3.941,910.000.000	417,850.000.000	2.8552
7.	Kab. Musi Rawas	2018	3.019,700.000.000	383,940.000.000	3.1996
		2019	1.920,260.000.000	664,500.000.000	2.9410
8.	Kab. Musi Rawas Utara	2018	922,980.000.000	383,940.000.000	3.0987
		2019	1.018,730.000.000	398,550.000.000	3.0659
9.	Kab. Ogan Ilir	2018	1.417,190.000.000	623,350.000.000	3.0434
		2019	1.631,000.000.000	649,590.000.000	2.8794
10.	Kab. Ogan Komering Ilir	2018	2.224,000.000.000	1.053,840.000.000	3.1356
		2019	2.471,790.000.000	1.085,600.000.000	2.9652
11.	Kab. Ogan Komering Ulu	2018	1.412,520.000.000	636,230.000.000	2.9876
		2019	1.614,340.000.000	662,540.000.000	2.8911
12.	Kab. OKU Selatan	2018	1.268,130.000.000	598,060.000.000	2.7696
		2019	1.394,330.000.000	624,570.000.000	2.7084
13.	Kab. OKU Timur	2018	1.627,160.000.000	767,170.000.000	2.8131
		2019	1.874,520.000.000	811,610.000.000	2.7045
14.	Kab. Pali	2018	1.226,430.000.000	317,400.000.000	3.0271
		2019	1.525,500.000.000	334,430.000.000	3.0456
15.	Kota. Lubuk Linggau	2018	923,900.000.000	449,080.000.000	2.9761
		2019	1.029,630.000.000	497,400.000.000	2.7623
16.	Kota Pagaralam	2018	769,450.000.000	391,940.000.000	2.9768
		2019	841,140.000.000	415,080.000.000	2.8660
17.	Kota Prabumulih	2018	958,370.000.000	416,310.000.000	3.0161
		2019	1.220,480.000.000	441,350.000.000	2.9633
18.	Kab. Lampung Barat	2018	1.124,190.000.000	521,740.000.000	3.3435
		2019	1.122,310.000.000	543,780.000.000	3.2098
19.	Kab. Tanggamus	2018	1.565,900.000.000	778,10.0006.000	2.8374
		2019	1.711,960.000.000	802,330.000.000	3.4001
20.	Kab. Lampung Selatan	2018	2.077,290.000.000	1.019,210.000.000	3.0379
		2019	2.279,590.000.000	1.054,040.000.000	2.8322
21.	Kab. Lampung Timur	2018	2.051,440.000.000	1.069,170.000.000	2.8935
		2019	2.132,690.000.000	1.106,580.000.000	2.8069

22.	Kab. Lampung Tengah	2018	2.474,610.000.000	1.319,480.000.000	3.0755
		2019	2.588,850.000.000	1.385,750.000.000	2.8899
23.	Kab. Lampung Utara	2018	1.719,190.000.000	949,770.000.000	3.0930
		2019	1.775,730.000.000	985,870.000.000	2.8389
24.	Kab. Way Kanan	2018	1.385,710.000.000	655,520.000.000	2.9928
		2019	1.398,940.000.000	681,960.000.000	2,9852
25.	Kab. Pesawaran	2018	1.285,920.000.000	669,280.000.000	2.9807
		2019	1.279,710.000.000	687,090.000.000	2.7933
26.	Kab. Tulang Bawang	2018	1.228,880.000.000	612,110.000.000	2.9011
		2019	1.188,270.000.000	642,120.000.000	2.7837
27.	Kab. Pringsewu	2018	1.150,550.000.000	621,970.000.000	2.9293
		2019	1.206,210.000.000	642,870.000.000	2.8924
28.	Kab. Mesuji	2018	844,390.000.000	446,270.000.000	2.7967
		2019	895,060.000.000	458,680.000.000	2.8076
29.	Kab. Tulang Bawang Barat	2018	946,200.000.000	463,480.000.000	2.9726
		2019	946,900.000.000	488,530.000.000	3.2435
30.	Kab. Pesisir Barat	2018	775,330.000.000	417,410.000.000	3.0672
		2019	831,570.000.000	437,180.000.000	2.8089
31.	Kota. Bandar Lampung	2018	2.162,100.000.000	1.034,730,000.000	2.9745
		2019	2.294,660.000.000	1.114,930.000.000	2.8870
32.	Kota. Metro	2018	850,860.000.000	455,730.000.000	3.2889
		2019	927,120.000.000	476,740.000.000	2.2023

(Sumber : BPK RI, 2018 - 2019.)

Berdasarkan dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung telah mengalami penurunan suatu realisasi anggaran dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD). Berikut Kab/kota yang termasuk pada Fenomena permasalahan yaitu Kab/Kota Palembang, Kab. Musirawas, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, dan Kab. Lampung Barat. Akibat terjadinya penurunan terhadap beberapa komponen kabupaten/kota tersebut telah menyebabkan kurangnya target untuk mencapai pendapatan asli daerah. Sehingga ekonomi masyarakat yang menghasilkan PAD

menurun drastis. Penurunan pendapatan asli daerah (PAD) tentu saja tidak baik bagi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Maka tingkat kemakmuran suatu pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dilihat dari pendapatan dana alokasi umum (DAU) peneliti tidak menemukan permasalahan pada dana alokasi umum. Dilihat dari dana alokasi umum (DAU) Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung yang merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat semakin besar dana alokasi umum (DAU) yang diberikan maka akan semakin tinggi pula tingkat pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan alokasi. Maka dilihat dari penghasilan kinerja pendapatan dana alokasi umum (DAU) dan tingkat ketergantungan pada masing – masing Kab/kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung sudah dikatakan sangat baik dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Dilihat dari data belanja modal dan skor EKPPD pada Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan yang belanja modalnya tinggi tetapi skor EKPPD nya rendah, yaitu terdapat pada Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. OKU Selatan, Way Kanan, Kab. Tulang Bawang, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Lampung Timur dan Kab. Bandar Lampung. Hal ini menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Karna logikanya semakin tinggi pendapatan belanja modal dan

skor EKPPD maka semakin baik tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal dan status daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai tentang “**Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh karakteristik pemerintahan daerah meliputi (status daerah, tingkat kemakmuran, belanja modal, dan tingkat ketergantungan) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
2. Bagaimana pengaruh status daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Bagaimana pengaruh tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara faktual tentang karakteristik pemerintah daerah yang diprosikan dengan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah meliputi (status daerah, tingkat kemakmuran, belanja modal, dan tingkat ketergantungan) terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Mengetahui pengaruh status daerah terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Mengetahui pengaruh tingkat kemakmuran terhadap kinerja pemerintah daerah ?
4. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah?
5. Mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan terhadap kinerja pemerintah daerah ?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis yang telah dipelajari di bangku kuliah, dan menambah wawasan tentang pemahaman karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat digunakan sebagai acuan ataupun menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang serupa dengan penelitian ini. dan dapat

menambah wawasan mengenai factor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Almamater

Sebagai referensi keilmuan/ informasi dan dokumentasi data penelitian yang dapat dijadikan referensi perpustakaan untuk penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaul Aziz (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Vol XI No 1, 2016.
- Asnidar, Novia Sintia Hardi (2019). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Langsa. Vol. 3, No.1, April 2019.
- Aulia Riska Kusuma (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Vol. 5, No. 1 Januari 2017.
- Darwanto dan Yustikasari (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Vol. 4, No.12.
- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, (2021). *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Skripsi* : Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Halim (2004). Pengukuran kinerja yang terdiri dari rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan, asli daerah, rasio efektifitas, debt servive coverage ratio dan rasio pertumbuhan. Vol. 4 No. 10 November 2018.
- Indra F. Bagjana, Edi Jaenudin, Syahrizal Ikram, R. Wedi Rusmawan Kusuma, Evita Puspitasari, Kurniawan (2021). *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*. Yrama Widya:Bandung.
- Jensen, M.C & Meeckling, W. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure Journal Of Financial Economic*, 3 (4), 305-360.
- Lia (2017). Tingkat kemakmuran (wealth) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Vol. 6, No 1 februari 2017.
- Mahsun (2013). Pengaruh tingkat kemakmuran dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Vol.IX No. 12 juli 2016.
- Nanda (2013).Karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. April-juli 2021.
- Nordiawan dan Hertati (2010). Mendefinisikan efisiensi antara hubungan barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan/efektifitas.

- Parassela Pangestu Primadiyah, Dini Rosdini, Sri Mulyani (2021). Pengaruh Tingkat Kekayaan Dan Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Vol.16. No. 2, April – Juni 2021.
- Rafika Aulia, Rahmawaty (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Vol. 5, No. 4, November 2020: 584-598.
- Sugiyono (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R& D*. Bandung : PT. Alfabet.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia.
- V. Wiratna (2020). Jenis penelitian. *Penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif*.